

LAMPIRAN I

TABEL KINERJA

TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	I	-
					II	-
					III	-
					IV	96,11*)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25 - 70,35	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70,25 - 70,35*)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	64,5*)
		Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,54	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,54*)
1.1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	61,7*)
1.2	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak			I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,06	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4,06*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.. 413.661.500
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.. 1.670.081.884
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.. 43.013.000
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.. 304.441.600
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.. 2.221.852.530
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.. 402.260.000
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.. 9.619.719.056
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.. 3.005.060.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 6.512.281.040
Jumlah Anggaran		Rp.. 24.192.370.610

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

NIP. 196603201996032002

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

“Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender”

Yang dimaksud dengan **“Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender”** berarti adanya upaya untuk Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender berarti adanya peningkatan kemampuan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses pembangunan yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Ini mencakup berbagai aspek, seperti: pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis kesetaraan gender. Dengan meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul .
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk	Rata -rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		menjadi subjek dan objek dalam proses pembangunan. IPBK menjadi penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keterlibatan penduduk dalam proses tersebut.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61,7	Target indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2025 pada dokumen RPJMD adalah 61,7 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah 61,4.

Uraian Sasaran 2 :

“Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak”

Yang dimaksud dengan **“Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak”** adalah meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak berarti adanya peningkatan upaya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan perempuan dan anak, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, penindasan, dan eksploitasi. Dengan meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul .

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan , termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Orang) per 100.000 penduduk perempuan adalah sebuah indikator untuk mengukur jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk perdagangan manusia, relatif terhadap jumlah penduduk perempuan. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kejadian kekerasan terhadap anak di suatu wilayah. Rasio ini dihitung berdasarkan jumlah kasus kekerasan anak per 10.000 anak di wilayah tersebut.	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	28	Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading RPJMD Tahun 2025-2029. Target 2025 adalah 28 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah 31.
Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	4,06	Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading RPJMD Tahun 2025-2029. Target 2025 adalah 4,06 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah 4,19.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	I	-
					II	-
					III	-
					IV	83 *)
		Indekss Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	91,61	I	-
					II	-
					III	-
					IV	91,61 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.512.281.040
	Jumlah Anggaran	Rp 6.512.281.040

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7 *)
2	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	5 *)
3	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	I	-
					II	-
					III	-
					IV	32 *)
4	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
5	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	22	I	-
					II	-
					III	-
					IV	22 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	164.248.500
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp	147.591.100
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	16.657.400
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp	5.568.435.652
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp	5.428.153.352
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	:	Rp	126.660.000
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	:	Rp	13.622.300

Jumlah Anggaran : Rp 5.732.684.152

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN


SEPTI WULANDARI, S.E
NIP. 198306082006042005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

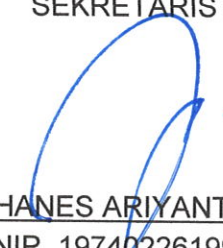
Nama : SITI AKIRI, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

Bantul, 19 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


SITI AKIRI, S.E
NIP. 196709191994032007

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4 *)
2	Dokumen Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	I	-
					II	-
					III	-
					IV	13 *)
3	Dokumen Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	I	-
					II	-
					III	-
					IV	13 *)
4	Dokumen Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2 *)
5	Dokumen Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2 *)
6	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
8	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
9	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
10	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
11	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
12	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
13	Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	97	I	-
					II	-
					III	-
					IV	97 *)
15	Dokumen Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3 *)
16	Dokumen Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	19	I	-
					II	-
					III	-
					IV	19 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp	312.725.442
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp	6.196.600
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	83.725.215
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp	7.927.800
4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	:	Rp	4.438.555
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp	2.400.000
6) Fasilitas Kunjungan Tamu	:	Rp	27.650.000
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	176.009.772
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	:	Rp	1.802.500
9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	:	Rp	2.575.000

B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	247.539.896
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp	4.800.000
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	29.750.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp	212.989.896
C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	219.331.550
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp	49.830.550
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	Rp	108.896.400
3) Pemeliharaan Mebel	:	Rp	4.850.000
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	55.754.600
Jumlah Anggaran :			Rp 779.596.888

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS

YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


SITI AKIRI, S.E
NIP. 196709191994032007

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Persen	17,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	17,5 *)
2.	Terlaksananya Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 413.661.500
B.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.670.081.884
C.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 43.013.000
	Jumlah Anggaran	Rp 2.126.756.384

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN



KARTIKA CAHYANI, S.H., M.Hum
NIP. 197005271991022001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SDM Yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)
2	Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)
3	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	17	I	-
					II	-
					III	-
					IV	17 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Dokumen Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	55	I	-
					II	-
					III	-
					IV	55 *)
5	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
6	Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					I	-
					II	-
					III	1 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 107.340.500

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota : Rp 107.340.500

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	206.275.000
1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	:	Rp	206.275.000
C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	94.550.000
1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	22.325.000
2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	72.225.000
D. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	190.000.000
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	190.000.000
E. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	79.151.000
1) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	79.151.000
Jumlah Anggaran :			Rp 677.316.500

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KARTIKA CAHYANI, S.H., M. Hum
NIP. 197005271991022001

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

LILIS WIJAYANTI, S.Sos, MM
NIP. 196904171990032006

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia : Rp 5.496.000
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi : Rp 5.496.000
 (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
 Kabupaten/Kota

B. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian : Rp 43.013.000
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak : Rp 43.013.000
Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp 48.509.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SIGIT JATMIKA ARI WIBOWO, S.Tr.Gz
NIP. 198511282010011012

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	66,13	I	-
					II	-
					III	-
					IV	66,13 *)
2.	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,11	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80,11 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 304.441.600
B.	Program: Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2.221.852.530
	Jumlah Anggaran	Rp 2.526.294.130

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laporan Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	I	-
					II	-
					III	-
					IV	50 *)
2	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
3	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 42.053.000

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 42.053.000

B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 262.388.600

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Rp 100.676.300

2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Rp 20.974.800

3) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Rp 140.737.500

Jumlah Anggaran : Rp 304.441.600

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK



KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



RENGGANIS SEKAR WANANDHI, S.Psi
NIP. 199210282020122013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd
NIP. 197310261993032001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Kegiatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Kegiatan	10	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10 *)
2	Dokumen SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	414.429.800
1) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	309.496.800
2) Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten	:	Rp	104.933.000

Jumlah Anggaran : Rp 414.429.800

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK



KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd
NIP. 197310261993032001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga Yang Menyediakan Layanan Rujukan	Lembaga	10	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10 *)
2.	Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)
3.	Terwujudnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Layanan Perlindungan Khusus Korban Kekerasan Anak	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran
A.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp 1.400.930.884
B.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.646.785.030
C.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 160.637.700
	Jumlah Anggaran	Rp 3.208.353.614

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHOIRUL REZA DEANI, SH
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

PIHAK PERTAMA
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

CHOIRUL REZA DEANI, SH
NIP. 199201232019022003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	I	-
					II	-
					III	-
					IV	6 *)
2	Dokumen AMPK Yang Mendapatkan Layanan	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	Layanan	160	I	-
					II	-
					III	-
					IV	160 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	:	Rp	1.042.612.000
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	1.042.612.000
B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.501.130.000
1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	:	Rp	1.501.130.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	2.543.742.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA



CHOIRUL REZA DEANI, SH
NIP. 199201232019022003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	140	I	-
					II	-
					III	-
					IV	140 *)
2	Dokumen AMPK Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	160	I	-
					II	-
					III	-
					IV	160 *)
3	Dokumen KIE Perlindungan Khusus Anak	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota : Rp 358.318.884

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 358.318.884

B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	145.655.030
1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	145.655.030
C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	160.637.700
1) Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	160.637.700
Jumlah Anggaran :			Rp 664.611.614

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan I/II karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PPA

RATRI ANDINI, S.Sos
NIP. 198204072010012019



Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	Angka	7,19	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7,19 *)
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	21,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	21,5 *)
3.		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65,24	I	-
					II	-
					III	-
					IV	65,24 *)
4.		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,1 *)
5.	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	85	I	-
					II	-
					III	-
					IV	85 *)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,8	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88,8 *)
7.		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	70,1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70,1 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 402.260.000
B.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 9.619.719.056
C.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 3.005.060.000
	Jumlah Anggaran	Rp 13.027.039.056

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002



dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
3	Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
4	Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3 *)
5	Dokumen Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	30	I	-
					II	-
					III	-
					IV	30 *)
6	Dokumen Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	I	-
					II	-
					III	-
					IV	34 *)
7	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			IV	1 *)
8	Dokumen Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan	Laporan	1	I II III IV	- - - 1 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	:	Rp	1.441.824.396
1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	:	Rp	695.300.000
2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	:	Rp	261.800.000
3) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	:	Rp	325.524.396
4) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	:	Rp	23.800.000

5) Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	:	Rp	135.400.000
B. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	:	Rp	6.075.576.700
1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	:	Rp	923.676.700
2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	:	Rp	5.151.900.000
C. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	:	Rp	1.461.600.000
1) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	:	Rp	1.461.600.000
Jumlah Anggaran :			Rp 8.979.001.096

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

Bantul, 19 September 2025
PIHAK PERTAMA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

RISTIAJI NUGROHO, A. Md. Kep
NIP. 198204092005011005

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12 *)
2	Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3 *)
3	Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
4	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
5	Dokumen Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga	Kampung KB	58	I	-
					II	-
					III	-
					IV	58 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				
6	Dokumen Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Yang Tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Yang Tersedia	Unit	10	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10 *)
7	Laporan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan/ Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
8	Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

Keterangan:

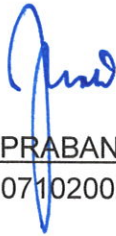
1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	:	Rp	13.260.000
1) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	:	Rp	13.260.000
B. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	216.800.000
1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	:	Rp	14.000.000
2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	:	Rp	142.800.000
3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	:	Rp	60.000.000
C. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	:	Rp	199.520.000
1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	:	Rp	199.520.000
D. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	:	Rp	325.460.000
1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	:	Rp	130.000.000
2) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	:	Rp	195.460.000
E. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	:	Rp	1.218.000.000
1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	:	Rp	1.218.000.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	1.973.040.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



dr. SUPRABANDARI
NIP. 197107102002122007

PIHAK PERTAMA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA



SRI WULANDARI, A.Md
NIP. 197303191999032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ສຳນັກງານປະທັບສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງການສຶກສາ

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. SUPRABANDARI
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi
NIP. 198901302022032001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12 *)
3	Laporan Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2871	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2871 *)
4	Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
5	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
6	Laporan Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	25 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	172.200.000
1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	:	Rp	172.200.000
B. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.902.797.960
1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	:	Rp	260.045.376
2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	:	Rp	1.436.607.000
3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	:	Rp	123.305.584
4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	:	Rp	57.840.000
5) Peningkatan Kesertaan KB Pria	:	Rp	25.000.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	2.074.997.960

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



dr. SUPRABANDARI
NIP. 197107102002122007

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi
NIP. 198901302022032001